

2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

LKjIP Tahun 2022 ini sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dari penyusunan LKjIP 2022 ini, memohon petunjuk dan bimbingan kepada ALLAH SWT semoga Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan presetasi kerja.

Lamongan, Januari 2023


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. M.S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198309 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 1

 C. Data Umum Organisasi 5

 1. Personil 5

 2. Sarana dan Prasarana 6

 3. Pembiayaan..... 10

 D. Sistematika Penyajian LkjIP 10

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11

 A. Rencana Strategi 11

 1. Tujuan 11

 2. Sarana dan Indikator Kinerja..... 11

 B. Rencana Kinerja Tahun 2022 11

 Program dan Kegiatan 11

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 14

 A. Capaian Kinerja Organisasi 14

 A.1 Pencapaian Kinerja..... 15

 A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja..... 18

 A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RJMD/RENSTRA 19

 A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional 20

 A.5 Analisis Penyebab Keberhasilanyang Telah Dilakukan 20

 A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21

 A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja 23

 B. Realisasi Anggaran..... 28

BAB IV PENUTUP..... 31

 A. Kesimpulan 31

 B. Saran..... 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan yang berfungsi melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek perkembangan di bidang perhubungan.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan di tahun 2022 adalah bagian akhir dari perjalanan rencana jangka menengah daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai tetapi juga memuat kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan memiliki tujuan dan sasaran seperti yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tahun 2021 – 2026. Tujuan dan sasaran tersebut dicapai melalui beberapa program dan kegiatan yang telah terencana dan dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Hasil pengukuran Kinerja kegiatan memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan rata - rata menunjukkan pencapaian yang baik meskipun ada beberapa kekurangan. Untuk pencapaian sasaran meskipun secara umum menunjukkan persentase yang baik tetapi masih terdapat nilai yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini tentunya menjadi catatan penting bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk mencari solusi agar kedepannya terjadi peningkatan dan dapat memenuhi target disetiap sasaran program.

Pada akhirnya semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022.

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itulah, maka setiap akhir tahun anggaran pemerintah diwajibkan untuk menyusun LKjIP sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan kedudukan, Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

1. Tugas

Merumuskan teknis dan strategis melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Perencanaan strategis dan teknis bidang perhubungan;
- c. Pelayanan umum bidang perhubungan;
- d. Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perhubungan;
- f. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan dinas;
- g. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- h. Pembinaan administrasi dinas dibidang perhubungan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasi yang akan di uraikan.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sarana dan Prasarana
 - 3.1 Seksi Perlengkapan Jalan
 - 3.2 Seksi Prasarana Jalan
 - 3.3 Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
 - 4.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 4.2 Seksi Perparkiran
 - 4.3 Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Angkutan
 - 5.1 Seksi Angkutan Orang

- 5.2 Seksi Angkutan Barang
- 5.3 Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- 7. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan

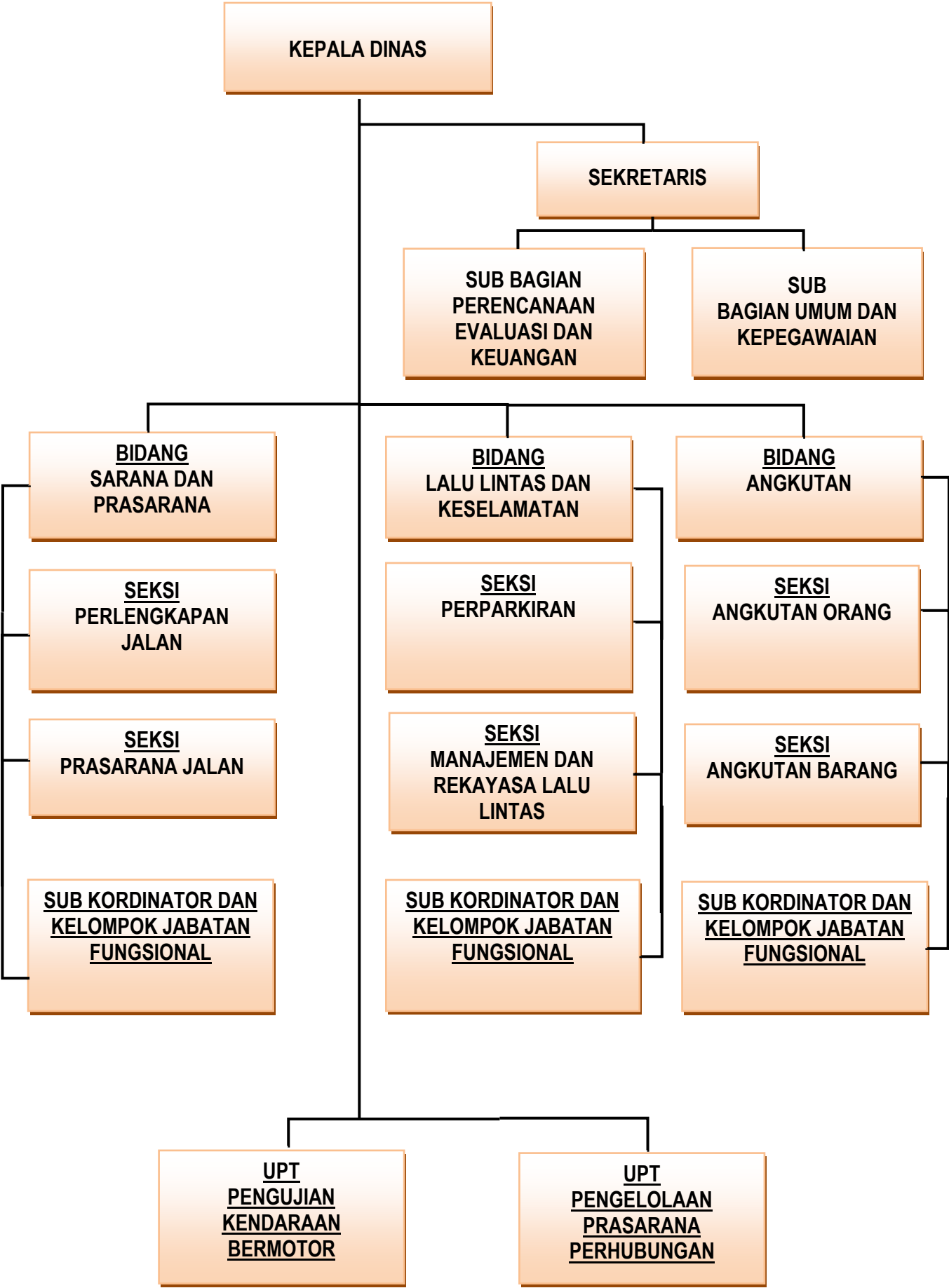
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana pada lampiran.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN**



C. Data Umum Organisasi

Untuk mendukung kegiatan / pelaksanaan tugas pokok diatas maka diperlukan adanya personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

1. Personil

Tabel I.1 Data Personil

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat / Gol Ruang	Jumlah	Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S.2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk 1 (IV/b)	1	S.1	1	
3	Kepala Bidang	3	Pembina (IV/a)	1	S.1	1	
				1	S.2	1	
			Penata Tk 1 (III/d)	1	S.2	1	
4	Kepala Sub Bagian	2	Penata Tk. I (III/d)	1	S.2	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1	S.1	1	
5	Kepala Seksi	5	Pembina (IV/a)	2	S.2	2	
			Penata Tingkat I (III/d)	2	S.2	1	
					S.1	1	
			Penata (III/c)	1	S.2	1	
6	Kepala UPT	2	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
			Penata Tk I (III/d)	1	S.1	1	
7	Kasubag TU UPT	1	Penata Tk I (III/d)	1	S.1	1	
8.	Jabatan Fungsional tertentu	2	Penata Tk.I (III/d)	2	S.2	2	
9.	Staf	34	Penata (III/c)	1	S.1	1	
			Penata Muda Tk I (III/b)	9	S.1	8	
					S.2	1	
			Penata Muda (III/a)	5	S.1	5	
			Pengatur Tingkat I (II/d)	5	SMA	5	
			Pengatur (II/c)	6	SMA	6	
			Pengatur Muda Tk I (II/b)	1	SMA	1	
			Juru Tingkat I (I/d)	1	SD	1	
				1	SMP	1	
Jumlah		51	Jumlah	51	Jumlah	51	

2. Sarana dan Prasarana

Tabel I.2 Data Sarana dan Prasarana

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Penggunaan Barang		Ket
					Layak	Tidak Layak	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01		GOLONGAN TANAH	7			
			Terminal Lamongan	1	1		Asset masih tercatat di DISHUB
			ExsBabat	1	1		
			Cargo Kusuma Bangsa	1	1		
			Cis Uji KIR/ PKB	1	1		
			Plosowayu	3	3		Berupa Tanah
2	02		GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	522			
		02	ALAT-ALAT BESAR	1			
		03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	35			
			<u>Kendaraan R2</u>	<u>24</u>			
			Sepeda Patwal	8	6	2	
			Sepeda Operasional	16			
			<u>Kendaraan R4</u>	<u>11</u>			
			Mobil Jabatan	2			
			Mobil Patwal	2			
			Mobil Operasional	3			Kondisi kurang layak
			Mobil Operasional PJU	4			
		04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	8			
			Alat Ukur Laut	1	√		
			Alat Ukur Menara	1	√		
			Alat ukur Pengujian	6	√		
		06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	336			
			CPU	4		√	
			Monitor	3		√	
			Komputer/ PC	26	17	9	
			Laptop/ Note Book	12	√		
			Printer	34	23	11	
			AC	23	19	4	
			Meja Rapat	12	10	2	
			Meja Komputer	5	3	2	
			mesin penghancur kertas	1		√	
			Radio (Wireless)	1	√		
			Mesin Ketik Elektronik	2	1	1	
			Mesin Foto Copy	1	√		
			Rak Besi/Metal	1		√	
			Rak Kayu	3	√		
			Filling Besi	5		√	
			Papan Nama Instansi	1	√		

			Copy Board/Elektrik White Board	1	√		
			Mesin Absensi	2	√		
			Barikade Knock Down	40	√		
			Tenda Kerucut	1	√		
			Kursi tamu	5	√		
			Kursi Putar	1		√	
			Meja Resepsion	1	√		
			Meja Kerja Eselon III	1	√		
			Meja Kerja Eselon IV	18	16	4	
			Meja Kerja Staf	38	30	8	
			Sof Land	3	√		
			KORDEN	12	√		
			Almari Arsip/ Etalase	13	√		
			SOFA POJOK/ L	1	√		
			Kursi Rapat	20	√		
			Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	19	√		
			Tempat Cuci Tangan	3	√		
			closed jobgkok	1	√		
			Lemari Besi	4	√		
			Meja Pelayanan	2	√		
			Rangka Backdrop & Rangka Vidio Wall	1	√		
			Rak Display Portable (Rak Server)	1	√		
			Standing Breaket TV (Standing TV (Jagrak)	1	√		
			Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	√		
			Scanner	1	√		
			Server	1	√		
			Router	1	√		
			Modem	1	√		
			Bufflet Kayu	2	√		
			Papan Nama UPT Pengujian Neon Boks	1	√		
			HDD External (Hardisk)	1	√		
			Pintu (Pas Dorkloser (1 Set Pintu & Perlengkapan)	1	√		
			Peralatan Jaringan di UPT PKB	1	√		
			Tangga Alumunium	2	√		
		07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	98			
			Handy Talkie (HT)	60	49	11	
			Antenna Base Telex	3	√		
			Rig Mobil	4	√		
			Area Traffic Control System (ATCS)	3	√		
			Radio Pancar Ulang	1	√		
			Facsimile	1		√	
			Radio SSB	2	√		
			Telephone (PABX)	1		√	
			Camera + Attachmen	5	√		

			LCD proyektor	1	√		
			Handycam	2	√		
			sound system	2	√		
			CCTV	2	√		
			CCTV Monitor	2	√		
			Vidio Wall	4	√		Rambu Penunjang ETLE
			TRAFFIC VOICE	2	√		Rambu Penunjang ETLE
			TV SMART	1	√		Rambu Penunjang ETLE
			Rambu Informasi Digital	1	√		Rambu Penunjang ETLE
			Ampli fier	1	√		Rambu Penunjang ETLE
		09	ALAT LABORATORIUM	11			Rambu Penunjang ETLE
			Alat Lab/ Ukur	9			Alat Uji di UPT PKB
			Tag Ampere	2			PJU
		10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN / KEAMANAN	33			
			CCTV	6	√		
			Rambu Himbauan	10	9	1	Rambu Penunjang ETLE
			Radar	1	√		ETLE
			HIGH PERFORMANCE CAMERA CHECKPOINT CAPTURE	2	√		ETLE
			HIGH PERFORMANCE CAMERA E-POLICE CAPTURE	2	√		ETLE
			HIGH-PRECISION SPEED INSFECTION RADAR	4	√		ETLE
			ENTERPRISE CAP SATA 6 TB	4	√		ETLE
			TRAFFIC SIGNAL LINGHT DETECTOR	1	√		ETLE
			TRAFFIC MANAGEMEN SERVER	1	√		ETLE
			NETWORK STORAGE DEVICE HYBRID SAN STORAGE	1	√		ETLE
			ETLE iVMS 8600 SYSTEM XEON SILVER 4110,16 GB, 1TB,WINSERV 2016	1	√		ETLE
	03		GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	204			
		11	<u>BANGUNAN GEDUNG</u>	<u>57</u>			
			Gedung Kantor Induk & pendukung Bangunan Lainnya	7	√		
			Gedung Bangunan Mushola	2	√		
			Gedung ASDP & pendukung Bangunan Lainnya	3	√		
			Terminal Paciran & pendukung Bangunan Lainnya	3	√		
			Gedung Kantor UPT PKB & pendukung Bangunan Lainnya	7	√		
			Terminal cargo Kusuma	5	√		

			Bangsa Type C & pendukung Bangunan Lainnya				
			Terminal Ngimbang Type C & pendukung Bangunan Lainnya	4	√		
			Terminal Brondong Type C & pendukung Bangunan Lainnya	2	√		
			Terminal Sukodadi Type C & pendukung Bangunan Lainnya	3	√		
			Pangkalan Terminal Angdes Mantup	1			
			Pangkalan Terminal Angdes Gondang	1			
			Pangkalan Terminal Angdes Sukorame	1			
			Pangkalan Terminal Angdes Exs Babat	1			
			Pangkalan Terminal Pucuk	1			
			Bangunan Halte	15			
			Selter Komputer	1			
		12	<u>MONUMEN</u>	<u>147</u>			
			Rambu Parkir	73			10 Titik
			Rambu Standart	18			446 Titik
			Rambu Model F	21			37 Titik
			Rambu Traffic Light	5			
			Rambu Traffic Light & CounterDown	2			
			Rambu Warning Light dan Flash Light	2			
			Rambu Warning Light	9			
			Rambu Marka	2			
			Rambu Guard Rail	3			51 Block
			Rambu RPPJ	3			27 Titik
			Rambu Traffic light dengan solar cell	3			
			Rambu warning linght solar cell	1			4 Unit
			Rambu Kecil	1			70 Unit
			Rambu Traffic voice	1			
			Rambu Paku jalan	1			100 Buah
			Rambu Patok tikungan (delinator)	1			77 Titik
			Monumen Pesawat	1			
	04		GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	18			
		13	JALAN DAN JEMBATAN	3			
		15	INSTALASI	3			+ 1 dari PJU Th 2021
		16	JARINGAN	441			6.502,- Titik
	05		GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA				
	06		GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
	07		ASET LAINNYA	34			

		03	ASET TIDAK BERWUJUD	5			
		04	ASET LAIN-LAIN	29			
JUMLAH				768			

3. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan bersumber dari dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 39.086.829.344,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.312.738.722,00 (92,90%)

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
	BELANJA DAERAH	39.086.829.344	36.312.738.722	92,90%
1	BELANJA OPERASIONAL	35.759.829.784	33.032.621.922	92,37%
	Belanja Pegawai	6.465.948.217	6.161.319.066	95,29%
	Belanja Barang dan Jasa	28.846.281.567	26.438.102.856	91,65%
	Belanja Bantuan Sosial	447.600.000	433.200.000	96,78%
2	BELANJA MODAL	3.326.999.560	3.280.116.800	98,59%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.122.208.000	1.090.864.800	97,21%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	336.191.560	334.700.000	99,56%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.868.600.000	1.854.552.000	99,25%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	39.086.829.344	36.312.738.722	92,90%

D. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika Penyajian LKjIP dalam laporan ini, disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tugas, pokok, fungsi dan struktur organisasi, data umum organisasi, dan sistematika penyajian LkjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi rencana strategi, rencana kinerja tahun 2022 dan perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan kinerja keuangan

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran. Serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam rencana kinerja 2022.

A. Rencana Strategis

1. Tujuan

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang tertuang dalam RENSTRA Dinas. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah

“Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan”

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Dari tujuan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mempunyai Sasaran dan Indikator Sasaran guna menentukan keberhasilan Dinas. Sasaran Dinas Perhubungan **adalah Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas.
- b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kegiatan pada perencanaan strategis tahun 2022. Adapun rencana kinerja tahun 2022 Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan

A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 4. Administrasi umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- 1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - a) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:
 - a) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota:
 - a) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - c) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8. Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan:
 - a) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

(terlampir)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perhubungan pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan piranti perencanaan yang telah dibuat. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan didasarkan pada target dan Realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana yang semakin baik. Perhitungan prosentase pencapaian rencana (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

Pencapaian kinerja

Realisasi

Rencana

=

X 100

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Visi Kabupaten Lamongan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan skala pengukuran dan predikat kinerja yaitu:

Tabel 3
Skala Pengukuran Keberhasilan

Skala Pengukuran	Penilaian
85 – 100	Sangat baik/sangat berhasil
70 < 85	Baik sekali
55 < 70	Kurang baik/kurang berhasil
< 55	Sangat kurang baik/tidak berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan lancar, hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel III.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	No	Indikator	Formula Indikator	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan	1	Indeks layanan lalu lintas angkutan jalan	$\frac{\text{IKM} + \text{VC Rasio} + \text{Prosentase Sarana Prasarana Perhubungan}}{3}$	77,9	82,22 76,80 + 75,17 + 94,70 / 3	105,54%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah ruas kondisi lancar}}{\text{Jumlah ruas jalan utama}} \times 100\%$	70%	75,17% 109/145 X 100%	107,38%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	Penilaian dari inspektorat	84,25		

No	Program	Indikator Program	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase sarana prasarana perhubungan yang berfungsi	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang berfungsi}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}} \times 100\%$	93,43%	94,70% 7282/7689 X 100%	101,35%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	IKM Internal Dinas Perhubungan	73	76,80	105,20%

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas secara umum indikator sasaran program Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah dicapai dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 100% target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya didukung oleh dua program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan urusan Perhubungan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Capaian Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan dengan indikator Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Target 77,9 telah terpenuhi sebesar 82,22 dengan capaian 105,54%.
- Capaian dua sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, diantaranya:
 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas dengan target 70% telah terpenuhi sebesar 75,17% dengan capaian 102,45%.
 2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, yaitu Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dengan target nilai sebesar 84,25% pada tahun 2022 telah di dapat melalui penilaian dari Inspektorat sebesar
- Capaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator Persentase sarana prasarana perhubungan yang berfungsi dengan target 93,43% telah terpenuhi sebesar 94,70% dengan capaian 101,27%.
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan indikator Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan dengan target 73% telah terpenuhi sebesar 76,80% dengan capaian 105,20%.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tabel Matrik Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	77,9	-	82,22%

Tabel Matrik Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas	-	70%	-	75,17%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	84,25	-	

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase sarana prasarana perhubungan yang berfungsi	-	93,43%	-	94,70%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	-	73	-	76,80

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RJMD/RENSTRA

Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RJMD/RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN
Tabel matrik tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubunga	Indeks layanan lalu lintas angkutan jalan	77,9	82,22	105,54%	81,		85,3			88,9			92,6		

Tabel matrik sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang berkualitas	70%	75,17%	107,35%	75%		80%			85%			90%		
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	84,25			87,25		90,25			93,25			96,25		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		TAHUN 2024			TAHUN 2025			TAHUN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase sarana prasarana perhubungan yang berfungsi	93,43%	75,17%	107,35%	94,43%		95,43%			96,43%			97,43%		
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Perhubungan	73	76,80	105,20%	76		79			82			85		

Tabel diatas merupakan perbandingan realisasi indikator kinerja tahun pertama RPJMD yaitu Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022-2026 (Tahun pertama RPJMD) . Dari Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabuptaen Lamongan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian kinerja telah memenuhi target bahkan lebih, sehingga sebisa mungkin di tahun-tahun selanjutnya dapat di pertahankan dan di tingkatkan kualitasnya.

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Tidak ada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum keberhasilan dari capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tahun 2022 telah mencapai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan tahun 2022 dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2022. Hal ini didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun faktor yang mendukung keberhasilan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan berdasarkan capaian dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya kepedulian dan komitmen dari penanggung jawab program/kegiatan
2. Terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) dari sisi kuantitas pegawai Dinas Perhubungan
3. Implementasi penganggaran yang berbasis pada kinerja sehingga setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Adanya peningkatan infrastruktur perhubungan seperti pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan pemasangan palang pintu perlintasan kereta api.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tahun 2022 mendapat APBD sebesar Rp 39.086.829.344,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.312.738.722,00 atau sebesar 92,90%. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi %
	Dinas Perhubungan	39.086.829.344,00	36.312.738.722,00	92,90
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	32.616.762.294,00	29.952.312.128,00	91,83
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.500.000,00	49.681.750,00	94,63
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.500.000,00	32.312.750,00	99,42
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	90.139.212,00	98,08
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.057.280.029,00	7.578.943.066,00	94,06
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.002.280.029,00	7.526.268.266,00	94,05
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	39.811.300,00	99,53
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.240.000,00	112.815.000,00	99,62
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	90.740.000,00	90.315.000,00	99,53
2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.604.700,00	678.771.812,00	99,73
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.801.400,00	9.801.400,00	100,00
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.165.300,00	20.027.300,00	99,32
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.071.600,00	50.941.600,00	99,75
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	398.313.000,00	397.050.700,00	99,68
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.311.000,00	19.270.000,00	99,79
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.942.400,00	181.680.812,00	99,86

E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.859.200,00	62.693.000,00	70,55
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.859.200,00	62.693.000,00	70,55
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.027.893.010,00	20.898.391.730,00	90,75
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.658.821.010,00	17.642.112.248,00	89,74
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.369.072.000,00	3.256.279.482,00	96,65
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.385.355,00	566.632.570,00	95,01
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.629.300,00	88.523.400,00	99,88
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.136.900,00	149.186.470,00	86,67
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.500.000,00	45.425.000,00	99,84
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.119.155,00	283.497.700,00	97,72
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.470.067.050,00	6.360.426.594,00	98,31
A	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	492.600.000,00	477.158.000,00	96,87
1)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	492.600.000,00	477.158.000,00	96,87
B	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.668.487.650,00	4.599.657.994,00	98,53
1)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.227.123.200,00	3.178.876.400,00	98,50
2)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.441.364.450,00	1.420.781.594,00	98,57
C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50.000.000,00	46.542.000,00	93,08
1)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	50.000.000,00	46.542.000,00	93,08
D	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	163.033.000,00	162.013.000,00	99,37
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	163.033.000,00	162.013.000,00	99,37

E	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	402.900.800,00	392.399.100,00	97,39
1)	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	182.255.000,00	180.000.000,00	98,76
2)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	220.645.800,00	212.399.100,00	96,26
F	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	353.033.000,00	348.881.700,00	98,82
1)	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	353.033.000,00	348.881.700,00	98,82
G	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	110.012.600,00	108.011.600,00	98,18
1)	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	34.000.000,00	33.050.000,00	97,21
2)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	20.000.000,00	19.799.000,00	99,00
3)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	56.012.600,00	55.162.600,00	98,48
H	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	200.000.000,00	195.914.400,00	97,96
1)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	200.000.000,00	195.914.400,00	97,96
I	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.848.800,00	99,50
1)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	30.000.000,00	29.848.800,00	99,50

A.7 Analisis Program / kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melalui 2 program, 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.086.829.344,00 dan terealisasi sebesar Rp. 36.312.738.722,00 (92,90 %) . Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.500.000,00 yang digunakan untuk kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.681.750,00 (94,63%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.057.280.029,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.002.280.029,00 dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan lain-lain dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.526.268.266,00 (94,05%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dan lain-lain dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 (100%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan bulanan/ semesteran dan lain-lain dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.674.800,00 (94,19%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.240.000,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.740.000,00 dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas ASN dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 90.315.000,00 (99,52%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 dipergunakan untuk kegiatan Bimtek Pegawai dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 (100%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
4. Administrasi umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 680.604.700,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.801.400,00 dipergunakan untuk pembelian komponen instalasi listrik dan bangunan kantor dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,801,400,00 (100%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.165.300,00 dipergunakan untuk pembelian peralatan dan

- perlengkapan kebersihan kantor dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.027.300,00 (99,32%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 3) Penyediaan Bahan Lohistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.071.600,00 dipergunakan untuk pembelian ATK, makanan dan minuman rapat/tamu dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.941.600,00 (99,75%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 398.313.000,00 dipergunakan untuk pengadaan barang cetak dan penggandaan dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 397.050.700,00 (99,68%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.311.000,00 dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (majalah & surat kabar) dan perundang-undangan dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.270.000,00 (99,79%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 181.942.400,00 dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.064.012,00 (102,27%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.859.200,00 yang digunakan untuk
- 1) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 62.693.000,00 (70,55%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.027.893.010,00 yang digunakan untuk:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.658.821.010,00 dipergunakan untuk pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.642.112.248,00 (89,74%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.369.027.000,00 dipergunakan untuk pembayaran jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan dan pengamanan kantor dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.256.279.482,00 (96,85%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 596.385.355,00 yang digunakan untuk:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.629.300,00 dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil jabatan dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88.523.400,00 (99,88%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.136.900,00 dipergunakan untuk perawatan dan operasional mobil jabatan dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.186.470,00 (86,67%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.500.000,00 dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan lain-lain dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.425.000,00 (99,84%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 290.119.155,00 dipergunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 283.497.700,00 (97,72%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 492.600.000,00 yang digunakan untuk
 - 1) Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota digunakan untuk kegiatan Sosialisasi keselamatan bagi juru mudi dan Bantuan sosial terkait antisipasi inflasi kenaikan harga bbm dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 477.158.000,00 (96,87%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.668.487.650,00 yang digunakan untuk:
 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.227.123.200,00 digunakan untuk pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), Pengadaan Traffic Light/Warning Light, Marka Jalan dan CCTV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.178.876.400,00 (98,50%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.441.364.450,00 digunakan untuk Rehabilitasi Penerangan Jalan

- Umum (PJU), Rehabilitasi Traffic Light/Warning Light, Marka Jalan dan CCTV dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.420.781.584,00 (98,57%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan
 - 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.542.000,00 (93,08%)
 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 163.033.000,00 yang digunakan untuk
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota digunakan untuk pengawasan penyelenggaraan parkir dan pembinaan jukir dan sosialisasi kesadaran masyarakat dalam tertib membayar pajak kendaraan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.013.000,00 (99,37%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 402.900.800 yang digunakan untuk:
 - 2) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 182.255.000,00 digunakan untuk cetak bukti lulus uji kendaraan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.000.000,00 (98,76%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.645.800,00 digunakan untuk rehabilitasi alat uji kendaraan bermotor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 212.399.100,00 (96,26%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 353.033.000,00 yang digunakan untuk
 - 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota digunakan untuk Pengadaan Palang Pintu, Monitoring dan sosialisasi keselamatan bagi pengguna lintasan kereta api dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 348.881.700,00 (98,82%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.012.600,00 yang di gunakan untuk:
 - 1) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.000.000,00 digunakan untuk Survey ruas jalan dengan realisasi

- keuangan sebesar Rp. 33.050.000,00 (97,21%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 digunakan untuk rapat forum lalu lintas dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.799.000,00 (99%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
 - 3) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.012.600,00 digunakan untuk monitoring andalalin dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.162.600,00 (98,48%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%
8. Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan dengan alokasi anggaran Sebesar Rp. 200.000.000,00 yang digunakan untuk
- 1) pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota digunakan untuk operasi terpadu pengamanan penertiban lalu lintas yang dilaksanakan dan pengaturan penertiban lalu lintas dengan realisasi keuangan sebesar Rp.195.914.400,00 (97,96%) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 yang digunakan untuk
- 2) pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota digunakan untuk survey Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.848.800,00 (99,50%) %) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan terdiri dari :

1. BELANJA LANGSUNG

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 mendapat belanja langsung sebesar Rp 39.086.829.344,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.312.738.722,00 atau sebesar 92,90%.

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel III.5 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2022		
	Target	Realisasi	Prosentase
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.100.000.000	8.588.740.500	85,04%
Parkir Berlangganan	8.525.000.000	7.658.780.000	89,84%
Parkir Harian	175.000.000	213.703.000	122,12%
Pengujian Kendaraan Bermotor	1.373.000.000	1.043.138.000	75,98%
Terminal	27.000.000	27.121.000	100,45%

Berdasarkan tabel diatas dapat di uraikan sebagai berikut:

1. PAD yang terkait dengan parkir berlangganan dan pengujian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi capaiannya dengan situasi perekonomian masyarakat yang masih belum normal akibat pandemi Covid-19 dan inflasi BBM.
2. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pengujian kendaraan maupun membayar pajak kendaraan bermotor masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Realisasi PAD yang terkait dengan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Parkir Belangganan yang masih belum optimal juga dipengaruhi oleh minimnya kegiatan penindakan dilapangan dari instansi lain yang juga dipengaruhi adanya dampak Covid-19.
4. Terkait dengan PAD parkir berlangganan kami sudah melakukan koordinasi dengan BAPENDA Tk.1 terkait dengan kecocokan data pemilik kendaran wajib pajak dengan wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. Setiap bulan kami melakukan rekonsiliasi untuk memastikan kebenaran data pemasukan setoran PAD untuk parkir berlangganan dengan menghadirkan para pihak terkait.
6. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak kendaraan plat merah sejumlah 1717 yang tersebar masing-masing dinas/OPD dan desa yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan masih perlu untuk ditumbuhkan kesadarannya serta perlu dilakukan untuk dilakukan penanganan khusus.

7. Dari tahun 2019 hingga saat ini kegiatan undian parkir berhadiah ditiadakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap antusias warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor
8. Berbagai upaya yang sudah kami lakukan, terkait dengan peningkatan PAD di Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - Untuk Pengujian Kendaraan Bermotor secara intensif sudah diberikan surat pemberitahuan kepada wajib uji dan pemilik perusahaan angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan secara tertib.
 - Menyampaikan brosur kepada masyarakat maupun pengusaha angkutan dan para pemilik kendaraan yang melaksanakan pengujian.
 - Mempermudah proses pendaftaran pengujian kendaraan bermotor secara online sebagai upaya untuk efisiensi biaya bagi para wajib uji
 - Jembatan timbang tidak beroperasi hingga saat ini
 - Banyaknya pengusaha angkutan umum yang tidak beroperasi lagi, termasuk dalam hal ini bus pariwisata masih belum bisa beroperasi secara maksimal

Selanjutnya terkait dengan PAD parkir berlangganan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan intensifikasi pemasukan PAD.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum terhadap pelaksanaan tugas bidang Perhubungan tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah dapat melaksanakan tugas pokok sesuai dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, indikator keberhasilan dapat dilihat dalam prosentase capaian kinerja pada setiap sasaran.
2. Target PAD yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, namun ada beberapa pos pendapatan yang melebihi target.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Guna lebih meningkatkan pengembangan jasa transportasi serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai diperlukan kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait.

B. Saran

Guna meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu :

1. Peningkatan sumber daya aparatur baik administrasi maupun teknis melalui pendidikan dan latihan baik struktural maupun fungsional.
2. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana.
3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan fungsi pengawasan internal serta koordinasi dengan instansi terkait.

Lamongan, Januari 2023



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. M.S. HERUWIDI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198909 1 001

1) Penghargaan

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 November 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mendapatkan apresiasi dari Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian dengan mendapatkannya Safety Railways.



Gambar 1 Penghargaan Safety Railways

2. Pada Tanggal 3 Februari 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mendapatkan predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.



Gambar 2 Sakip Predikat A

2) Inovasi

Untuk inovasi dari dinas perhubungan terdapat 2(dua) kegiatan:

1. Call Center / Pengaduan Pelayanan Penerangan Jalan Umum\

Dengan adanya pengaduan pelayanan penerangan jalan umum (PJU) diharapkan masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan teknisi yang ada pada call center [089508716716](tel:089508716716), sehingga pada saat ada PJU yang padam maka kami dapat segera menuju ke lokasi dan memperbaikinya.



2. Pembangunan Palang Pintu Perlintasan KAI

Pengadaan palang pintu perlintasan sebidang jalur kereta api, mengingat masih tingginya angka kecelakaan pada saat menyebrang rel kereta api, sehingga pemasangan palang pintu dapat membuat pengendara merasa lebih aman dan nyaman.



3. Aplikasi Pendaftaran Online Uji Kir

Dengan adanya pendaftaran melalui online diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menguji kendaraan wajib uji, karena pada menu aplikasi online uji kir masyarakat tidak perlu antri dan dapat melaksanakan pendaftaran dimana saja dan kapan saja dengan waktu dan hari yang diinginkan ujikir.lamongankab.go.id

